



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 – 2020

Syahri Azda Putra

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

Alamat Korespondensi: syahriap@gmail.com

Abstract

This research is conducted based on Supreme Audit Agency's (BPK) opinion on Local Government Financial Statement (LKPD) that is released annually and to observe the effect of BPK's opinion has on local government financial performance in North Sulawesi Province which consists of 15 municipalities/cities and 1 provincial government. In addition to BPK's opinion, the author takes some variables in consideration to analyze factors affecting local government financial performance in order to find out problems faced by local government. The dependent variable used in this research is Efficiency Ratio that reflects the local government financial performance. This research uses Least Square Dummy Variable (LSDV) regression method with selected fixed effect model. It is found that, some variables that significantly affect financial performance of local government are government expenditures, independent financing, BPK's opinion, tax ratio, and Indonesia Net Budget Financing (SILPA).

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rilis opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta untuk melihat pengaruh opini BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) lingkup Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 15 pemerintah kota/kabupaten dan 1 pemerintah provinsi. Selain opini BPK, peneliti juga memasukkan variabel lainnya untuk menganalisis faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda guna mengetahui secara mendalam permasalahan yang dihadapi Pemda. Variabel terikat yang digunakan adalah rasio efisiensi yang mencerminkan kinerja keuangan Pemda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dengan model *fixed effect*. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 16 Pemda, variabel-variabel yang mempengaruhi rasio efisiensi secara signifikan adalah belanja pemerintah, *independent financing*, opini BPK, rasio pajak, dan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).



Keywords: pemerintah daerah, kinerja, keuangan, opini BPK, efisiensi, Sulawesi Utara

JEL Classification: H71, H72, H76

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah daerah (Pemda) saat ini sangatlah besar dalam mengelola kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini merupakan akibat dari terbitnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat merupakan kewajiban pemda yang harus dilakukan secara merata dan adil, dengan mengatur potensi daerah secara optimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun keuangan.

Pengelolaan potensi daerah tersebut harus dengan semangat mewujudkan tata kelola yang baik atau *good governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya mewujudkan *good governance* mengemuka dengan terbitnya UU Keuangan Negara yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kemandirian suatu daerah tentu sangat diharapkan dengan diberlakukannya UU yang mengatur

keuangan negara dan otonomi daerah tersebut. Menurut Astuti dan Haryanto (2006), perwujudan kemandirian daerah yang diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dari otonomi daerah. Selain meningkatkan kemandirian daerah, pemda juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas dalam mengatur keuangan Pemda (Putri et al., 2020).

Kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja berdasarkan penghitungan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan Pemda dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi menghitung realisasi pengeluaran atau belanja terhadap realisasi total pendapatan (Halim, 2007).

Kinerja keuangan Pemda dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain belanja pemerintah, *independent financing*, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rasio pajak, rasio retribusi, ukuran dari Pemda, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hubungan antara belanja pemerintah, *independent financing*, opini BPK, rasio pajak, rasio retribusi, ukuran dari pemda, dan SILPA terhadap kinerja keuangan Pemda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda sehingga dapat

diketahui akar permasalahan yang menyebabkan kinerja keuangan Pemda rendah.

TINJAUAN LITERATUR

Rasio efisiensi merupakan alat analisis yang menghitung biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Menurut Sumarjo (2010) dalam (Sesotyaningtyas, 2012), pengukuran kinerja Pemda dilihat dari nilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pemda yang digunakan adalah rasio efisiensi untuk menghitung kinerja keuangan Pemda. Semakin rendah nilai rasio efisiensi maka semakin bagus kinerja Pemda tersebut. Berarti Pemda berhasil dalam meningkatkan efisiensi belanjanya. Sebaliknya, semakin besar atau tinggi nilai rasio efisiensi, berarti kinerja Pemda tersebut memiliki kinerja yang tidak baik. Hal ini diakibatkan karena Pemda tidak dapat melakukan belanja dengan efisien.

Ukuran yang menggambarkan seberapa besar Pemda, dapat diketahui dari jumlah aset yang dimiliki oleh Pemda. Berdasarkan Retnowati (2016), jumlah aset yang dimiliki oleh suatu Pemda dapat menggambarkan ukuran dari Pemda tersebut. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki, semakin kompleks Pemda tersebut untuk mempertahankan dan mengelola asetnya. Pada penelitian ini, ukuran yang akan digunakan adalah jumlah total aset yang dimiliki oleh Pemda. Berdasarkan penjelasan di atas, total aset dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap kinerja keuangan,

sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Total aset memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat dan institusi yang diatur dalam suatu peraturan, dengan tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Pajak merupakan kontributor utama PAD, yang akan mempengaruhi kinerja keuangan dari Pemda. Terdapat berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain yang merupakan sumber kekuatan pendapatan dari daerah. Dalam penelitian ini, jumlah pajak yang diterima akan dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah, sehingga menjadi rasio pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, rasio pajak dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap kinerja keuangan, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Rasio pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

Retribusi daerah adalah semua pungutan yang diterima oleh daerah akibat dari pembayaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan secara khusus dan/atau disediakan oleh Pemda untuk kepentingan perorangan atau badan. Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pembiayaan PAD, meskipun tidak seformal pajak daerah.

Pada penelitian ini, jumlah retribusi akan dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah, sehingga menjadi rasio retribusi. Berdasarkan penjelasan di atas, rasio retribusi dijadikan sebagai variabel yang

kemungkinan berdampak terhadap kinerja keuangan, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Rasio retribusi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

Independent financing mengukur seberapa besar PAD membiayai kebutuhan belanja Pemda tersebut. (Halim, 2007). Berdasarkan penjelasan di atas, *independent financing* dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap kinerja keuangan, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: *Independent financing* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

Anggaran pada tahun sebelumnya adalah sumber penting bagi keuangan Pemda terutama pada awal tahun berikutnya. Saldo awal kas dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan sehari-hari pada awal tahun. Namun, pada Pemda, saldo kas tidak dapat digunakan sebelum mendapat persetujuan. Dalam penelitian ini, saldo awal kas yang digunakan adalah SILPA. Berdasarkan penjelasan di atas, SILPA dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap kinerja keuangan, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H5: SILPA memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

Pendapat BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa terhadap kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat digunakan sebagai indikator acuan (*benchmark*) untuk mengevaluasi akuntabilitas dari instansi pemerintah. Opini BPK dapat meningkatkan atau

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atas laporan yang disajikan oleh Pemda.

Opini BPK terdiri dari empat jenis opini, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak memberikan pendapat (TMP), dan tidak wajar (TW). Opini WTP memiliki arti bahwa BPK beranggapan sistem pengendalian internal (SPI) sudah memadai dan pada pos-pos laporan keuangan (LK) tidak ada salah saji yang material. Opini WDP diberikan ketika BPK beranggapan SPI memadai, namun pada beberapa pos LK terdapat salah saji yang material. Opini TMP diberikan ketika BPK beranggapan bahwa lingkup pemeriksaan dibatasi, sehingga tidak bisa menilai SPI dan memberikan opini yang sesuai. Opini TW diberikan ketika BPK beranggapan SPI tidak memadai dan pada pos LK terdapat salah saji yang material.

Tentu semua Pemda berharap untuk mendapatkan opini WTP dari BPK. Dengan diperolehnya opini WTP, berarti prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) telah diikuti. Selanjutnya, Pemda telah memberikan penjelasan yang memadai atas informasi umum mengenai entitas, angka-angka dalam LK, dan informasi lainnya yang bersifat material. Kemudian, informasi dalam LK tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, dengan adanya SPI yang memadai, tentunya memberikan keyakinan yang cukup bagi pemeriksa untuk meyakini kewajaran atas pos-pos yang disajikan dalam LK.

Penelitian dari Parwanto dan Harto (2017) menunjukkan bahwa terdapat

hubungan antara opini BPK dengan kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan penjelasan di atas, opini BPK dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap kinerja keuangan, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H6: Opini BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dimana Pemda tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, belanja pemerintah dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H7: Belanja pemerintah memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rilis opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu Pemda. Opini BPK dapat menjadi dorongan bagi Pemda untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik, termasuk kinerja keuangan yang semakin membaik pula. Selain itu, dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tentunya akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada kinerja keuangan Pemda. Oleh karena itu, analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda sangat diperlukan untuk mengetahui akar dari permasalahan yang dialami oleh Pemda.

Tahapan penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Notasi dan Penghitungan Variabel

Notasi Variabel	Penghitungan Variabel
Efisiensi	Total belanja pemerintah / total pendapatan
<i>Expense</i> (Belanja Pemerintah)	Jumlah total belanja pemerintah dengan mengubah data menjadi <i>log</i>
<i>Independent_Financing</i> Opini_BPK	Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Belanja Pemerintah Opini BPK pada tahun 2014 – 2020, dengan mengubah data menjadi 1 untuk WTP dan 0 untuk opini yang lain
Rasio_Pajak	Pendapatan Pajak / PAD
Rasio_Retribusi	Pendapatan Retribusi / PAD
SILPA	Jumlah SILPA pada akhir tahun dengan mengubah data menjadi <i>log</i>
Total_Aset	Jumlah total aset Pemda dengan mengubah data menjadi <i>log</i>

Sumber: Diolah penulis

Tahap pertama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Identifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda sangatlah penting untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemda, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan kedepannya.

Tahap kedua adalah mengembangkan model regresi dan menguji signifikansi model tersebut. Variabel dependen adalah rasio efisiensi, sedangkan variabel independennya adalah belanja pemerintah (*expense*), *independent financing*, opini BPK, rasio pajak, rasio retribusi, SILPA, dan total aset. Khusus untuk variabel belanja pemerintah, SILPA, dan total aset dilakukan perubahan data menjadi *log* pada aplikasi Excel. Notasi dan cara penghitungan masing-masing variabel dijabarkan pada Tabel 1.

Data dan Sampel

Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder, yang berasal dari LKPD lingkup Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Data yang digunakan terutama dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data yang digunakan termasuk dalam kategori *data panel*.

Langkah Analisis

Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda sudah diketahui, maka dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut akan diuji untuk melihat faktor mana yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Metode yang digunakan untuk

melihat signifikansi pengaruh antara faktor dengan kinerja keuangan Pemda adalah regresi *data panel*.

Untuk melakukan regresi *data panel*, terdapat tiga model *data panel*, yaitu:

Pertama, Model *common effect* (CE atau *Pool*). Teknik ini untuk memperkirakan parameter model *data panel* dengan kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Pendekatan yang dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model CE sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Kedua, Model *fixed effect* (FE). Dalam model FE, memperlakukan α_i sebagai konstanta untuk setiap individu (sebagai parameter model). Teknik ini memperkirakan *data panel* dengan asumsi koefisien regresi tetap antar individu dan antar waktu. Pendekatan yang dipakai menggunakan variabel *dummy*, sehingga seringkali disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Model FE seperti berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \mu_{it} \quad (2)$$

Ketiga, Model *random effect* (RE). Model RE memperlakukan α_i sebagai konstanta untuk setiap individu. Diasumsikan bahwa (α_i) dan peubah eksogen saling bebas (bersifat *random*). Selain itu, karena adanya korelasi antara residual di dalam persamaan, maka teknik metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan *estimator* yang efisien, oleh karena itu model RE menggunakan metode *Generalized*

Least Square (GLS). Model RE adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \mu_{it} \quad (3)$$

Untuk menyeleksi model *data panel*, menggunakan tiga pengujian yaitu:

Pertama, Uji *Chow* digunakan untuk melihat apakah model *FE* lebih baik dari model *CE*. Kriteria pemilihan model dilakukan apabila:

- Menerima H_0 atau memilih model *CE* dibandingkan *FE*, jika nilai *prob. F* di atas nilai signifikansi.
- Menerima H_1 atau menolak H_0 dengan memilih model *FE* dibandingkan *CE*, jika nilai *prob. F* di bawah nilai signifikansi.

Kedua, Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara model *FE* dan *RE*. Kriteria pemilihan model dilakukan apabila:

- Menerima H_0 atau lebih memilih model *RE* dibandingkan model *FE*, jika nilai probabilitas *chi squares* di atas nilai signifikansi.
- Menerima H_1 dengan model terpilih adalah *FE* dibandingkan *RE*, jika nilai probabilitas *chi squares* di bawah nilai signifikansi.

Ketiga, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk melihat model terbaik apakah model *RE* atau *CE*. Kriteria pemilihan model dilakukan apabila:

- Menerima H_0 atau lebih memilih model *CE* dibandingkan model *RE* dengan kriteria nilai *p value* di atas nilai signifikansi.
- Menerima H_1 atau lebih memilih model *RE* dibandingkan model *CE*, jika nilai *p value* di bawah nilai signifikansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan melalui Uji *Chow*, dan Uji *Hausman*, model regresi yang dipilih adalah model *FE* sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Chow dan Hausman

Pengujian	p-value	Kesimpulan	Model Terpilih
Uji <i>Chow</i>	0.0000	Menolak H_0	<i>FE</i>
Uji <i>Hausman</i>	0.0000	Menolak H_0	<i>FE</i>

Sumber: Diolah penulis

Dari uji model, model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model *FE*. Setelah model diketahui, maka berikutnya melakukan uji asumsi klasik.

Berdasarkan Iqbal (2015), pengujian asumsi klasik pada *data panel* hanya uji *multikolinearitas* dan *heteroskedastisitas*. Sedangkan uji *autokorelasi* dapat tidak dilakukan. Untuk pengujian normalitas, penulis menggunakan asumsi *central limit theorem* yang menyatakan bahwa apabila data yang digunakan besar, maka distribusi data dianggap normal. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengujian asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji *multikolinearitas* dan *heteroskedastisitas*.

Berdasarkan hasil uji *multikolinearitas*, korelasi antar variabel independen di bawah 90, yang berarti tidak ada gejala *multikolinearitas*. Sedangkan hasil uji *heteroskedastisitas*, nilai probabilitas *chi squares* sebesar 0,8189, nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi (0,8189 > 0,05), artinya menolak H_0 atau menerima H_1 , yang berarti tidak ada gejala *heteroskedastisitas*.

Gambar 1. Hasil *Fixed Effect*

Dependent Variable: EFISIENSI				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/27/21 Time: 09:48				
Sample: 2014 2020				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 112				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.895106	1.632093	3.611991	0.0005
EXPENSE	-0.109086	0.063604	-1.715088	0.0898
INDEPENDENT_FINANCING	-1.361545	0.328644	-4.142918	0.0001
OPINI_BPK	-0.056761	0.027056	-2.097866	0.0388
RASIO_PAJAK	-0.130276	0.068670	-1.897134	0.0611
RASIO_RETIBUSI	0.018513	0.066149	0.279861	0.7802
SILPA	-0.022391	0.008402	-2.664998	0.0091
TOTAL_ASET	-0.045673	0.029544	-1.545944	0.1257
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.618072	Mean dependent var	0.899838	
Adjusted R-squared	0.523662	S.D. dependent var	0.097775	
S.E. of regression	0.067481	Akaike info criterion	-2.373082	
Sum squared resid	0.405281	Schwarz criterion	-1.814819	
Log likelihood	155.8926	Hannan-Quinn criter	-2.146577	
F-statistic	6.546728	Durbin-Watson stat	2.123525	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil *FE* adalah seperti Gambar 1.

Dari hasil model, dapat diketahui bahwa untuk model Efisiensi dipengaruhi oleh *expense* (signifikan pada 10%, *independent financing* (signifikan pada 1%), opini BPK (signifikan pada 5%), rasio pajak (signifikan pada 10%), dan SILPA (signifikan pada 1%).

Setelah diketahui hasil pengujian, maka persamaan regresi menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} = & 5.895 - 0.109 \text{ Expense} - \\ & 1.361 \text{ Independent} \\ & \text{Financing} - 0.056 \text{ Opini} \\ & \text{BPK} - 0.130 \text{ Rasio Pajak} \end{aligned}$$

$$- 0.022 \text{ SILPA} + \text{error} \quad (4)$$

Berdasarkan hasil *R-squared*, yaitu sebesar 0,618, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 61,8%, sedangkan sisanya 38,2%, dipengaruhi oleh variabel di luar model.

Model memenuhi kriteria dengan hasil *prob (F-Statistic)* yang di bawah 5%, berarti semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama.

Hasil penelitian sudah sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Expense atau Belanja Pemerintah Daerah

Tabel 3. Hasil Olah Data *Expense*

Rata-Rata	Efisiensi	<i>Log Expense</i>	<i>Expense</i>
Rata-Rata	0.8998	27.0394	870.855.240.715
Di atas Rata-Rata	0.9849	27.0839	932.119.481.509
Di bawah Rata-Rata	0.8286	27.0022	819.634.318.085

Sumber: Diolah penulis

Belanja pemerintah mempunyai pengaruh terhadap rasio efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan, maka harus melakukan efisiensi pada belanjanya. Belanja pemerintah harus jelas penggunaannya. Tentunya efisiensi harus dibarengi dengan ketercapaian *output*.

Pemda sebaiknya mulai meninggalkan prinsip bahwa anggaran harus terserap semua. Pemda harus mulai berpikir bahwa anggaran harus dilaksanakan dengan efisien. Efisien yang dimaksud adalah terealisasinya anggaran di bawah target yang ditetapkan, namun *output* tercapai. Penyerapan anggaran jangan dijadikan sebagai satu-satunya ukuran pelaksanaan anggaran yang baik. Ukuran pelaksanaan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah pusat dapat digunakan sebagai contoh, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari 13 indikator, yaitu: realisasi anggaran, capaian *output*, kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara), pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP), revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), deviasi halaman III DIPA, perencanaan kas, pagu minus,

dispensasi SPM, penyelesaian tagihan, dan data kontrak.

Sesuai dengan data yang ada, Pemda yang memiliki nilai efisiensi di bawah rata-rata sebagaimana Tabel 3 mempunyai jumlah belanja yang lebih kecil daripada Pemda yang mempunyai nilai efisiensi di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa belanjanya lebih efisien dibandingkan Pemda yang mempunyai nilai efisiensi di atas rata-rata.

Nilai efisiensi yang baik adalah yang di bawah 1, yang mendekati 1 justru tidak baik, yang berarti belanjanya tidak efisien.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gamayuni (2016), dimana *expense* atau belanja pemerintah tidak mempengaruhi kinerja keuangan rasio efisiensi.

Independent Financing

Independent Financing merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar PAD memenuhi kebutuhan belanja Pemda yang bersangkutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio *Independent Financing* yang semakin membaik akan mengakibatkan penurunan rasio efisiensi, dalam arti rasio efisiensinya semakin membaik. Hasil penelitian selaras dengan hasil yang diperoleh oleh Safariani (2021) dalam penelitiannya, di mana

Independent Financing pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Rasio Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, setiap kenaikan rasio pajak sebesar 1 persen akan menurunkan rasio efisiensi sebesar 0,13%. Hal ini berarti pendapatan pajak yang semakin meningkat, secara proporsional akan menurunkan rasio efisiensi. Peningkatan pajak tentunya harus dibarengi dengan melakukan efisiensi pada belanja pemerintah. Hasil ini selaras dengan hasil yang diperoleh oleh Islami, Frymaruwah, dan Mayasari (2020) dalam penelitiannya, dimana rasio pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Opini BPK

Sesuai dengan hasil pengujian, opini BPK mempengaruhi rasio efisiensi.

Tabel 4. Hasil Efisiensi dan Opini BPK

WTP	0.8973
Non WTP	0.9151

Sumber: Diolah penulis

Pemda yang memperoleh opini WTP memiliki kecenderungan nilai rasio efisiensinya lebih baik daripada daerah yang memperoleh opini selain WTP. Terdapat perbedaan nilai rasio efisiensi pada daerah yang mendapat opini WTP dengan daerah yang mendapat opini selain WTP.

Sesuai dengan data yang ada pada Tabel 4 di atas, Pemda yang mendapat opini WTP, nilai rasio efisiensinya cenderung lebih kecil daripada Pemda yang mendapat opini selain WTP. Hal ini berarti Pemda yang mendapat opini WTP cenderung lebih efisien.

Hasil ini selaras dengan hasil yang diperoleh oleh Virgasari (2009) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara opini audit dengan kinerja keuangan Pemda.

Rasio Retribusi

Berdasarkan hasil pengujian, rasio retribusi tidak mempengaruhi rasio efisiensi. Hal ini dikarenakan secara nominal jumlah retribusi masih di bawah jumlah pajak. Berdasarkan data yang ada, jumlah rata-rata retribusi hanya sebesar Rp15,2 miliar dibandingkan jumlah rata-rata pajak yang sebesar Rp.86,2 miliar. Berdasarkan hasil rasio pun, rasio retribusi berada di bawah rasio pajak.

Pemda dalam meningkatkan PAD masih bergantung dengan jumlah pajak. Retribusi masih belum menjadi perhatian dari Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil ini sesuai dengan Islami, Frymaruwah, dan Mayasari (2020), di mana rasio retribusi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Retribusi belum berpengaruh secara optimal terhadap proporsi perolehan PAD.

SILPA

Sesuai dengan hasil pengujian, jumlah SILPA mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio efisiensi, namun pengaruhnya negatif. Setiap 1% kenaikan jumlah SILPA akan menurunkan rasio efisiensi sebesar 0,02%. Hal ini berarti semakin besar jumlah SILPA, semakin efisien juga belanja pemerintah. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djuniar dan Zuraida (2018) bahwa

SILPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Jumlah Aset

Jumlah aset tidak mempengaruhi rasio efisiensi dikarenakan jumlah aset yang besar tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang optimal bagi daerahnya. Pemda mendapat pendapatan yang sangat kecil dari aset yang dikelola, aset yang dimiliki belum dikelola secara maksimal, hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya aset yang *idle* atau kurang produktif.

Berdasarkan data yang ada, jumlah aset yang sangat besar hanya mampu menghasilkan pendapatan rata-rata yang masih di bawah 60%, yaitu 54%.

Hal ini selaras dengan hasil yang diperoleh oleh Nugraha dan Prasetyo (2018) dalam penelitiannya.

Tabel 5. Hasil Olah Jumlah Aset

Keterangan	Rata-rata 2014-2020
Jumlah Aset	1,782,337,136
Jumlah Pendapatan	967,992,290
ROA	54%

Sumber: Diolah penulis

Aset pemerintah yang semakin besar, akan mengakibatkan Pemda mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap aset-aset tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara adalah *expense* atau belanja pemerintah, *independent*

financing, opini BPK, rasio pajak, dan SILPA.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran yang diberikan adalah pertama, Pemda agar melakukan efisiensi pada belanjanya. Belanja dialokasikan berdasarkan skala prioritas ketika Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pemda dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan anggaran belanjanya melalui penerapan IKPA dengan 13 indikatornya.

Kedua, Pemda agar melakukan ekstensifikasi terhadap PAD. Pemda mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan sosial.

Ketiga, Pemda agar menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun langkah-langkah untuk melakukan penyempurnaan yang terukur sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan untuk memperoleh opini yang lebih baik terhadap LKPD pada tahun yang akan datang. Selain itu, Pemda agar membangun *road map* yang jelas dan dengan komitmen yang tinggi dari pemimpin daerah serta sinergi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tidak lupa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar pelaksanaan anggaran menjadi akuntabel. Sinergi antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dengan dinas dan inspektorat juga perlu untuk ditingkatkan.

Keempat, Pemda agar menetapkan batas minimal efisiensi dengan tetap memperhatikan ketercapaian *output*.

Kelima, Pemda agar mengoptimalkan aset yang dimiliki agar pendapatan daerah dapat meningkat.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, berdasarkan hasil penelitian masih banyak variabel yang berada di luar model dan belum dilakukan pengujian, sehingga diharapkan pada penelitian mendatang dapat dianalisa lebih lanjut terkait variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dengan periode yang lebih panjang, mungkin di atas sepuluh tahun.

REFERENSI

- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Balance Akuntansi dan Bisnis*, 3 (2), 445-455. Retrieved from <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/download/1447/1229>
- Gamayuni, R.R. (2016). The effect of local government characteristics and the examination result of Indonesian supreme audit institution on economic growth, with financial performance as intervening variable in district and city government of Lampung Province. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(18). Retrieved from <https://iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/33295>.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah-akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astuti, E.S., & Haryanto, J.T. (2006). Kemandirian daerah: sebuah perspektif dengan metode path analysis. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*. Retrieved from <https://library.ui.ac.id/detail?id=92190>
- Islami, A.Y., Frymaruwah, E., & Mayasari, R. (2020). Factors influencing the financial performance of South Sumatra Province local government for the period 2012 - 2016. *Journal of Critical Reviews*, 7(15). DOI: 10.31838/jcr.07.15.282
- Iqbal, M. (2015). *Regresi data panel (2) "tahap analisis"*. Retrieved from Perbanas Institute website: <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/>.
- Nugraha, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27-34. DOI:<http://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh hasil pemeriksaan bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1-9. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18259>
- Putri, L.E. & Aswar, K., & Ermawati. (2020). Performance measurement of local government in Indonesia: A conceptual study. *Information*

- Management and Business Review*, 12(1), 4-44. Retrieved from [https://doi.org/10.22610/imbr.v12i1\(1\).3027](https://doi.org/10.22610/imbr.v12i1(1).3027)
- Retnowati, R. (2016). *Analysis of the effect of regional wealth levels, regional expenditure, regional government, leverage and intergovernmental revenue sizes on regional government financial performance*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Safariani, D. (2021). Analysis of financial performance of district/city governments after regional autonomy in North Sumatera Province. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 26(2), 72-26
- Retrieved from: <https://ijpsat.ijsh-journals.org/index.php/ijpsat/article/download/3064/1884>
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. (Skripsi). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Virgasari, A. (2009). *Hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan kinerja keuangan Daerah*. (Tesis), Malang: Universitas Brawijaya.